

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenaikan garis kemiskinan menggambarkan bahwa kesejahteraan yang menjadi tujuan negara belum terealisasikan. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2013¹ yakni “Garis kemiskinan pada Maret 2013 adalah Rp. 284.454,- per kapita per bulan. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya inflasi Maret 2012 ke Maret 2013 sebesar 6,36%”.

Pada dasarnya, permasalahan yang kompleks ini tidak mutlak dibebankan pada negara, walaupun negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan penduduk. Akan tetapi beberapa lembaga (lembaga-lembaga keuangan) juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membantu masyarakat untuk berwirausaha yaitu dengan meningkatkan produktifitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adanya pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut akan sangat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia khususnya DIY menjadi lebih baik. Menurut Gubernur Bank Indonesia (Agus Martowardojo)² “Jumlah wirausahawan Indonesia sangat rendah, baru mencapai 1,56% dari jumlah penduduk yang idealnya memiliki 2%

¹Berita resmi statistik D.Y Yogyakarta 1 Juli 2013 No. 31/07/34/Th.XIV.

²Republika, Kamis 21 November 2013, hal : 13

wirausahawan. dimana sekitar 98-99% wirausahawan di Indonesia merupakan pelaksana IMK yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto hingga 57%”.

Perlu dikembangkan secara masif agar stabilitas perekonomian Indonesia stabil dan berkembang, karena IMK (Industri Mikro Kecil) merupakan salah satu fundamental ekonomi yang berkontribusi pada negara cukup besar. Pendapatan usaha IMK tahun 2013 sebagian besar disumbang oleh industri Makanan sebesar 39,75%, dan industri Pakaian Jadi 16,91% dari total pendapatan usaha IMK 2013³.

Tabel 1.1
Perkembangan IMK Nasional 2013

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	2013	
	Banyak Usaha	Pendapatan (Milyar)
Makanan	1.167.541	194.703
Minuman	47.470	2.701
Pakaian Jadi	340.002	82.820

Sumber : Data BPS DIY 2014

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Yogyakarta sebagai kota pariwisata memiliki potensi yang bagus untuk mengembangkan IMK, dalam jurnal penelitian No. 2 tahun 2007 BAPPEDA Kota Yogyakarta disebutkan bahwa potensi kepariwisataan nasional DIY menduduki peringkat kedua setelah Bali⁴. Sehingga peluang untuk berwirausaha terbuka luas untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Niat dan kehendak masyarakat untuk berubah datang dari dalam sistem sosial dan

³ Profil Industri Mikro dan Kecil.BPS : 2013

⁴<http://www.jogjakota.go.id/app/modules/upload/files/dok-perencanaan/7-jurnal-penelitian2.pdf>(diunduh pada 10/02/2014 10:11)

ide, menjadikan mereka mempunyai potensi dan kapasitas untuk perubahan menuju kondisi lebih baik secara mandiri⁵.

Usaha untuk meningkatkan IMK adalah sebuah bentuk pengurangan kaum miskin, salah satu dari IMK yang merepresentasikannya adalah pedagang pasar tradisional yang memiliki varian jenis usaha baik peralatan rumah tangga, rempah-rempah, makanan, jajanan, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan sentuhan lembaga keuangan mikro untuk mengeluarkan potensi dan meningkatkan produktifitas perdagangan.

Salah satu lembaga yang mampu membantu meningkatkan potensial usaha masyarakat adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang relatif kecil dan fleksibel untuk melayani usaha mikro-kecil adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Syariah. Operasionalnya sangat mendukung dan menunjang perekonomian rakyat khususnya mikro dan kecil melalui kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah⁶. Secara dinamis BMT lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro.

Terlepas dari fungsi *baitul maal* itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu, yaitu *baitut tamwil* atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif dari para *mustahik* (pemilik) ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi pedagang

⁵ Soetomo : 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal : 73

⁶Supardie, Didik Ahmad : 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam*

di pasar tradisional dengan prinsip syariah. Keberadaan BMT menjawab keterbatasan masyarakat kecil dalam mengakses peminjaman.

Lembaga ini menggunakan konsep bagi hasil, tidak mematok keuntungan yang pasti dan tidak memastikan keuntungan di muka⁷. Kerugian mungkin saja terjadi, karena bagi hasil dapat diartikan sebagai pembagian hasil keuntungan atau kerugian bersama-sama, baik pemilik modal maupun pengelola. Menurut Dwi Agung Nugroho Arianto(2011)⁸ :

“Karakteristik perbankan syariah sangat ‘bias’ terhadap aktivitas ekonomi sektor riil, di mana berbagai ciri dan fitur produk bank syariah yang ada memberikan insentif bagi pembiayaan-pembiayaan untuk tujuan produktif. Aqad-aqad utama yang digunakan dalam perbankan syariah adalah aqad *partnership*, modal ventura, perdagangan, manufaktur dan sewa...”.

Metode *profit and loss sharing* (pembagian untung dan rugi) atau *revenue sharing* (pembagian pendapatan) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya⁹, akan meningkatkan produktifitas dan kelancaran dalam menjalankan usaha. Namun perlu diingat, setiap usaha kadang kala mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam Jurnal Tsaqofah Sadr(2010) menjelaskan¹⁰ :

“Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut...”.

⁷Khaf, Monzer dkk : 2010. *Tanya jawab keuangan dan bisnis kontemporer dalam tinjauan syariah*. Solo:PT. Aqwa Media Profetika. Hal : 57

⁸<http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/download/794/618>(diunduh pada 22/11/2013 12:51)

⁹ Dewi Nurul M dan Fadia Fitriyanti : 2010, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful*. Lab Hukum. Fakultas Hukum UMY. Hal : 98

BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan di pasar tradisional Yogyakarta. Dan nasabahnya terdiri dari berbagai kalangan, yang sebagian besar mereka adalah pedagang, maka transaksi dengan BMT agar dapat terus bertahan dan mengembangkan usaha mereka sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional adalah bentuk ikhtiyar. Selama beroperasi, BMT menunjukkan peranannya yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pembiayaan dari tahun ke tahun yang terdapat dalam data Induk Koperasi Syariah, yakni :

Tabel 1.2
Laporan keuangan INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) per Juni

No	Tahun	Pembiayaan yang diberikan
1	2009	Rp. 28.827.535.576,21
2	2010	Rp. 87.217.899.910,80
3	2011	Rp. 87.217.899.910,80
4	2012	Rp. 124.474.794.064,00
5	2013	Rp. 163.926.961.071,00

Sumber data : www.inkopsyah.co.id

Dengan pembiayaan yang cukup tinggi ini, namun masih tetap ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pedagang pasar tradisional di lapangan, antara lain :

Tabel 1.3
Kendala Dalam Menjalankan Usaha

No	Jenis Kesulitan	Jumlah
1	Permodalan	37,13%
2	Bahan Baku	24,42%
3	Pemasaran	20,76%

Mayoritas masalah dalam menjalankan usaha didominasi kesulitan dalam bidang permodalan. Keberadaan BMT sangat membantu dan mempermudah pedagang pasar tradisional dalam mendapatkan pembiayaan sekaligus dapat mengatasi masalah permodalan guna memperkuat usaha pedagang untuk mengembangkan usahanya.

Jika BMT lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya, maka usaha serta hasil yang didapatkan oleh pedagang dan BMT akan lebih. Secara riil, BMT Tamzis yang langsung berhubungan dengan pedagang pasar tradisional Beringharjo yang lokasinya berada di tengah kota yang sekaligus menjadi tempat wisata, BMT Surya Asa Artha yang berhubungan langsung dengan pedagang pasar Gamping Sleman yang pedagangnya adalah mayoritas penduduk asli, dan BMT Mitra Lohjinawe yang berhubungan dengan pedagang pasar tradisional Bantul yang pedagangnya campuran. Ketiga BMT tersebut mempunyai kontribusi dalam mengembangkan pedagang pasar tradisional karena secara geografis sangat strategis untuk melakukan pembiayaan untuk mengatasi masalah permodalan.

Untuk mengetahui Peran BMT dalam menyentuh usaha pedangang-pedagang pasar tradisional di Yogyakarta, maka mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul "Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Pasar Tradisional Di Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Usaha pedagang pasar tradisional di Yogyakarta merupakan bagian dari usaha ekonomi rakyat yang potensial, namun potensi yang dimiliki belum dioptimalkan dengan baik, karena keterbatasan modal yang mereka miliki menghambat untuk memproduksi lebih, apabila modal kecil atau terbatas maka produksi juga tidak akan maksimal, sehingga keuntungan akan ikut terpengaruhi. Dengan peran pembiayaan yang diberikan BMT menjadi sebuah alternatif yang dapat membantu perkembangan usaha pedagang pasar tradisional. Untuk itu, perlu diteliti peran BMT dalam berkontribusi pada optimalisasi ekonomi rakyat, sehingga dapat menggambarkan dampak pembiayaan tersebut.

Dari uraian di atas, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pembiayaan BMT terhadap perkembangan usaha pedagang pasar tradisional ?
2. Bagaimana modal dan pendapatan usaha pedagang pasar tradisional antara sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dari BMT ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui peran pembiayaan BMT terhadap perkembangan usaha pedagang pasar tradisional.
2. Menganalisis modal dan pendapatan pedagang antara sebelum dan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan pemahaman tentang peran BMT dalam pembiayaan usaha pedagang pasar tradisional di Yogyakarta.
- b. Sebagai referensi dan perbandingan dalam melihat peran pembiayaan BMT terhadap usaha pedagang pasar tradisional bagi para peneliti yang bermaksud hendak melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pelaku BMT, pemerintah dan masyarakat agar lebih intens memperhatikan usaha pedagang supaya terwujud kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai upaya untuk mengembangkan peran pembiayaan BMT terhadap usaha pedagang pasar tradisional yang berdampak pada perekonomian nasional.
- c. Sebagai bentuk atensi penulis dalam menyikapi fenomena ekonomi sosial dalam masyarakat sekaligus sebagai upaya merealisasikan sebuah karya agar dapat digunakan untuk kepentingan umum.